

The Influence of Domestic Investment and Government Expenditure on the Open Unemployment Rate Through Economic Growth in Banten Province

Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten

Tiara Ayu Kusumaningtyas^{1*}, Muchtolifah²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

19011010030@student.upnjatim.ac.id¹, muchtolifah@yahoo.com²

*Corresponding Author

ABSTRACT

One of the macroeconomic problems faced by Banten Province is the high level of open unemployment rate. This problem is in contrast to the realization of domestic investment and government expenditure which tend to increase, as well as the relatively high economic growth. Hence, this condition is not under the ideal conditions in existing theories. This study aims to determine the effect of domestic investment and government expenditure on the open unemployment rate in Banten Province through economic growth as an intervening variable by using time series data from 2007 to 2021 sourced from the National and Banten Province Central Bureau of Statistics. This study uses the path analysis method and Sobel test to determine the mediating effect of intervening variable. The results of the study conclude that partially, domestic investment and economic growth do not directly affect the open unemployment rate, while government expenditure directly affects the open unemployment rate. Meanwhile, domestic investment and government expenditure do not indirectly affect the open unemployment rate through economic growth.

Keywords: Domestic Investment, Government Expenditure, Economic Growth, Open Unemployment Rate

ABSTRAK

Salah satu permasalahan makroekonomi yang dihadapi oleh Provinsi Banten adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka. Masalah ini berbanding terbalik dengan perkembangan realisasi PMDN dan pengeluaran pemerintah yang cenderung meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi ideal pada teori-teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dengan menggunakan data *time series* dari 2007 hingga 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur serta uji Sobel untuk mengetahui pengaruh mediasi dari variabel intervening. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial PMDN dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara langsung, sedangkan pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, PMDN dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: PMDN, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan demi mencapai kondisi yang lebih baik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tumbel et al., 2018). Kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari pengangguran, yang didefinisikan oleh Sukirno dalam Ishak (2018) sebagai suatu kondisi dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Pengangguran dapat diukur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yakni persentase

jumlah pencari kerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah (Noviatamara et al., 2019).

Data dari World Bank (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia berada pada posisi ketiga dari sepuluh negara ASEAN pada tahun 2021. Permasalahan ini tentu tidak terlepas dari kontribusi tiap provinsi yang ada, salah satunya yaitu Provinsi Banten yang merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka nomor tiga tertinggi di skala nasional pada tahun 2021. Selama periode tahun 2012-2021, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten juga selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional serta perkembangannya cenderung fluktuatif. Selain itu, dalam lingkup Pulau Jawa yang notebene merupakan sentral perekonomian nasional, rata-rata tingkat pengangguran terbuka selama periode tahun 2012 hingga 2021 di Provinsi Banten menempati posisi pertama dari enam provinsi yang ada, yaitu mencapai 9,31%.

Untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan pengkajian mengenai faktor-faktor yang memiliki hubungan atau pengaruh dengan tingkat pengangguran terbuka, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat diartikan sebagai proses meningkatnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Tumbel et al., 2018). Hukum Okun menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga lapangan pekerjaan akan bertambah, penyerapan tenaga kerja meningkat, dan akhirnya menurunkan pengangguran (Mankiw, 2003 dalam Yacoub & Firdayanti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Jirang et al. (2018) dan Radila et al., (2021) juga menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Di sisi lain, penelitian Yacoub & Firdayanti (2019) memberikan temuan yang berbeda, dimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ialah tidak signifikan.

Meskipun perkembangannya cukup fluktuatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tergolong tinggi, karena pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-8 nasional. Selain itu, selama periode tahun 2012-2021, pertumbuhan ekonomi Banten juga selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional, kecuali pada 2020 yang menjadi titik terendahnya akibat pandemi sehingga persentase pertumbuhan hanya sebesar -3,39%. Pada tahun 2021, berbagai program dan stimulus yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten berhasil memperbaiki kondisi perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan hingga mencapai 4,44%.

Pertumbuhan ekonomi sekaligus pengangguran juga tidak terlepas dari besarnya investasi yang ditanamkan di daerah tersebut. Menurut Sukirno dalam Buana et al. (2018), investasi merupakan belanja penanaman modal untuk membeli sarana produksi yang akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi diperlukan sebagai syarat tercapainya pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang (Murni, 2006 dalam Tumbel et al., 2018). Selain itu, peningkatan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) juga akan meningkatkan pertumbuhan bisnis atau penciptaan industri serta memberikan input teknologi baik dalam bentuk produksi atau permesinan, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan pengangguran (Lusiana, 2012 dalam Helvira & Rizki, 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Pramesti & Yasa (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian (Silaban & Siagian, 2021) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari investasi terhadap pengangguran. Meskipun demikian, temuan yang berbeda diperoleh dari penelitian Tumbel et al. (2018) yang menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tidak pula signifikan terhadap pengangguran menurut Helvira & Rizki (2020).

Perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten memiliki tren yang positif dengan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, dari yang semula hanya 2.490,28 Milyar Rupiah pada tahun 2012 hingga mencapai 31.145,66 Milyar Rupiah pada tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Banten telah membangun iklim investasi yang kondusif. Hanya saja, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 25.989,49 Milyar Rupiah.

Selain investasi, terdapat indikator lain yang juga berperan dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi pengangguran, yaitu pengeluaran pemerintah. Teori Keynes menyatakan bahwa diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Hakib, 2019). Selain itu, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa akan menciptakan kesempatan kerja dan pada akhirnya mengurangi pengangguran (Jirang et al., 2018). Bukti empiris diperoleh dari penelitian Buana et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara Jirang et al. (2018) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Meskipun demikian, ditemukan pula hasil yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran dalam penelitian Tumbel et al. (2018).

Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Banten cenderung meningkat namun belum dapat dikatakan stabil karena terjadi penurunan pada tahun 2013 meskipun tidak terlalu signifikan. Begitu pula pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 12,77% dari tahun 2019 yang semula mencapai 11.324,59 Milyar Rupiah menjadi hanya 9.879,31 Milyar Rupiah, sebelum kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi 11.660,63 Milyar Rupiah.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Provinsi Banten yang merupakan objek dalam penelitian ini masih memiliki masalah terkait tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif dan selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional, serta rata-ratanya selama tahun 2012-2021 merupakan yang tertinggi di lingkup Pulau Jawa. Pada kenyataannya, kenaikan pertumbuhan ekonomi, realisasi PMDN, dan pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, dimana kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Penelitian-penelitian terdahulu yang menguji keterkaitan antara variabel-variabel tersebut juga masih memiliki perbedaan hasil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

2. Tinjauan Pustaka Investasi (PMDN)

Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang dialokasikan oleh masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah untuk membeli barang-barang modal atau peralatan produksi dengan tujuan mengganti atau menambah barang modal yang digunakan untuk menambah produksi di masa mendatang (Murni, 2016). Selanjutnya, Mashudi et al. (2017) membagi investasi menjadi *Public Investment* dan *Private Investment*, dimana *Public Investment* merupakan investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sedangkan *Private Investment* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Berdasarkan sumber kepemilikan modal, investasi swasta dapat dibagi lagi menjadi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Ningsih & Sari, 2018). Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Kambono & Marpaung, 2020).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang didefinisikan oleh Murni (2016) sebagai seluruh pengeluaran pemerintah yang atas pengeluaran tersebut pemerintah dapat menerima balas jasanya secara langsung. Sementara itu, Mankiw (2018) menyebutnya dengan istilah belanja pemerintah, yang diartikan sebagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa oleh pemerintah lokal, negara bagian, hingga pemerintah federal, termasuk di dalamnya adalah biaya upah pegawai pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno dalam Hasan et al. (2018), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran perkembangan kondisi perekonomian suatu wilayah pada tahun tertentu dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan total output nasional dalam suatu tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam satuan persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran menurut Falianty (2019) adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja dan sedang berkeinginan untuk bekerja, namun belum berhasil memperoleh pekerjaan. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan pengangguran sebagai penduduk yang sedang tidak bekerja namun sedang mencari lapangan kerja, menyiapkan usaha baru, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena sudah mendapatkannya namun belum mulai bekerja (Roring et al., 2020). Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam satuan persen (Mankiw, 2018).

Hubungan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori Keynes menjelaskan bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena investasi merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat, sehingga meningkatnya investasi akan memacu laju pertumbuhan ekonomi (Mahyuddin, 2021). Teori Pertumbuhan Harrod-Domar juga menjelaskan bahwa investasi memegang peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Murni, 2016). Hal ini dikarenakan investasi memungkinkan terjadinya peningkatan *output* perekonomian melalui peningkatan stok barang modal. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif atau searah antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Investasi terhadap Pengangguran

Menurut Mashudi et al. (2017), penambahan barang modal akibat investasi akan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Sejalan dengan itu, Blanchard (2016) dalam Fathi (2021) juga menjelaskan bahwa investasi akan mendorong kegiatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan, dan kesempatan kerja baru tersebut pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengangguran.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Teori Keynesian, sistem ekonomi pasar tampaknya sulit untuk menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan bahkan sering menimbulkan *instability*, *inequity*, dan *inefficiency* sehingga akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam

menciptakan pertumbuhan ekonomi (Murni, 2016). Oleh sebab itu, menurut Keynes diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hakib, 2019). Hukum Wagner juga menunjukkan adanya hubungan yang positif atau berbanding lurus antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Salhab & Soedjono, 2012 dalam Mahzalena & Juliansyah, 2019).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran

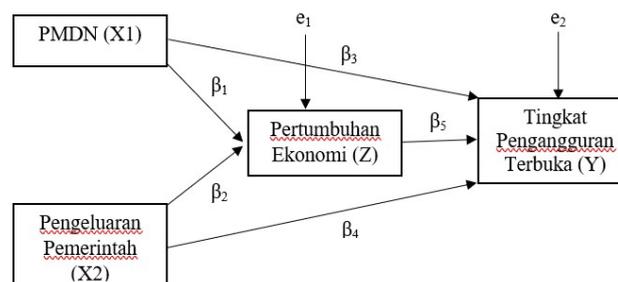
Belanja pemerintah dapat menjadi salah satu sarana dalam menanggulangi pengangguran, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya (Putong, 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Keynes yang menyatakan bahwa diperlukan intervensi pemerintah dalam sistem perekonomian, dimana suntikan dana berupa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*) dinilai dapat meningkatkan output nasional sehingga pada akhirnya mengurangi pengangguran (Falianty, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negative atau berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Hukum Okun (*Okun's Law*) menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, dimana setiap pertumbuhan GNP atau PDB sebesar 2,5% pada tahun tertentu akan diikuti penurunan tingkat pengangguran sebesar 1% (Putong, 2013). Dengan kata lain, terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Hal ini terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan diikuti dengan kenaikan proses produksi, sehingga akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap untuk memenuhi output produksi yang diminta. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja tersebut pada akhirnya akan mengurangi pengangguran (Garnella et al., 2020).

3. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, yang dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki permasalahan terkait tingkat pengangguran terbuka yang cenderung fluktuatif dan selalu lebih tinggi dari tingkat nasional, serta rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun menempati peringkat tertinggi di lingkup Pulau Jawa. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk *time series* yang diperoleh dari dokumen atau publikasi pada *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Nasional dari tahun 2007 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) yang disertai uji sobel dengan alat analisis SPSS versi 26. Berikut merupakan model struktural analisis jalur dalam penelitian ini.



Gambar 1. Model Struktural Analisis Jalur

Selanjutnya, dari model struktural analisis jalur tersebut dapat dijabarkan dua persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Persamaan Struktural I

$$PERT = \alpha + \beta_1PMDN + \beta_2PP + e_1$$

2. Persamaan Struktural II

$$TPT = \alpha + \beta_3PMDN + \beta_4PP + \beta_5PERT + e_2$$

Keterangan :

PERT = Pertumbuhan Ekonomi (Z)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

PMDN = PMDN (X1)

PP = Pengeluaran Pemerintah (X2)

 β = Koefisien Regresi α = Konstanta

e = Error Term

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Langsung

1. Persamaan Struktural I

Tabel 1. Hasil Analisis Pengaruh PMDN (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z)

| Model | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| | B | Std. Error | | |
| 1 (Constant) | -18.763 | 9.269 | -2.024 | .066 |
| PMDN (X1) | -.00035 | .00007 | -4.645 | .001 |
| PP (X2) | 3.194 | 1.148 | 2.783 | .017 |

Dependent Variable: PERT (Z)

Dari hasil uji tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$PERT = \alpha + \beta_1PMDN + \beta_2PP + e_1$$

$$PERT = -18,763 + (-0,00035)PMDN + (3,194)PP + e$$

Berikut beberapa interpretasi yang dapat diambil dari persamaan regresi tersebut.

- Nilai konstanta (α) sebesar -18,763 (bernilai negatif) menunjukkan bahwa apabila PMDN dan pengeluaran pemerintah diasumsikan konstan, maka nilai pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -18,763 persen.
- Koefisien variabel PMDN (β_1) sebesar -0,00035 (bernilai negatif) menunjukkan bahwa apabila PMDN mengalami kenaikan sebesar satu Milyar Rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,00035 persen dengan asumsi bahwa variabel pengeluaran pemerintah konstan.
- Koefisien variabel pengeluaran pemerintah (β_2) sebesar 3,194 (bernilai positif) menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar satu Milyar Rupiah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan sebesar 3,194 persen dengan asumsi bahwa variabel PMDN konstan.

Koefisien Determinasi

Tabel 2. Koefisien Determinasi Persamaan Struktural I

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .824 ^a | .680 | .626 | 1.50991 |

Berdasarkan tabel di atas diketahui koefisien determinasi sebesar 0,680 yang artinya, variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Z) yang mampu diterangkan oleh variabel PMDN (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) adalah sebesar 0,680 atau 68%, sedangkan 32% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel di luar persamaan ini.

Uji F (Simultan)**Tabel 3. Output Uji F Persamaan Struktural I**

| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 58.030 | 2 | 29.015 | 12.727 | .001 ^b |
| | Residual | 27.358 | 12 | 2.280 | | |
| | Total | 85.388 | 14 | | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai sig. uji F sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$ serta nilai $F_{hitung} 12,727 > F_{tabel} 3,89$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PMDN (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Z).

Uji t (Parsial)**Tabel 4. Output Uji t Persamaan Struktural I**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | -18.763 | 9.269 | -2.024 | .066 |
| | PMDN (X1) | -.00035 | .00007 | -4.645 | .001 |
| | PP (X2) | 3.194 | 1.148 | 2.783 | .017 |

Dependent Variable: PERT (Z)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil uji t untuk persamaan struktural I sebagai berikut.

- Variabel PMDN (X1) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha 0,05$ serta nilai $t_{hitung} -4,645 > t_{tabel} 2,17881$ berarti bahwa variabel PMDN (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z).
- Variabel pengeluaran pemerintah (X2) dengan nilai signifikansi sebesar $0,017 < \alpha = 0,05$ serta nilai $t_{hitung} 2,783 > t_{tabel} 2,17881$ berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z).

2. Persamaan Struktural II**Tabel 5. Hasil Analisis Pengaruh PMDN (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (Z) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | 58.964 | 5.468 | 10.784 | .000 |
| | PMDN (X1) | .00013 | .00006 | 2.029 | .067 |
| | PP (X2) | -5.697 | .750 | -7.599 | .000 |
| | PERT (Z) | -.016 | .147 | -.109 | .915 |

Dependent Variable: TPT (Y)

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$TPT = \alpha + \beta_3 \text{PMDN} + \beta_4 \text{PP} + \beta_5 \text{PERT} + e_2$$

$$TPT = 58,964 + (0,00013)\text{PMDN} + (-5,697)\text{PP} + (-0,016)\text{PERT} + e$$

Berikut beberapa interpretasi yang dapat diambil dari persamaan tersebut.

- Nilai konstanta (α) sebesar 58,964 (bernilai positif) menunjukkan bahwa apabila PMDN, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi diasumsikan konstan, maka nilai tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 58,964 persen.
- Koefisien variabel PMDN (β_3) sebesar 0,00013 (bernilai positif) menunjukkan bahwa apabila PMDN mengalami kenaikan sebesar satu Milyar Rupiah, maka tingkat pengangguran terbuka

juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,00013 persen dengan asumsi bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi konstan.

- c. Koefisien variabel pengeluaran pemerintah (β_4) sebesar -5,697 (bernilai negatif) menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar satu Milyar Rupiah, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar 5,697 persen dengan asumsi bahwa variabel PMDN dan pertumbuhan ekonomi konstan.
- d. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (β_5) sebesar -0,016 (bernilai negatif) menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar 0,016 persen dengan asumsi bahwa variabel PMDN dan pengeluaran pemerintah konstan.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Koefisien Determinasi Persamaan Struktural II

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .969 ^a | .939 | .922 | .76898 |

Berdasarkan tabel di atas diketahui koefisien determinasi sebesar 0,939 yang berarti bahwa variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Z) yang mampu diterangkan oleh variabel PMDN (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) adalah sebesar 0,939 atau 93,9%, sedangkan sisanya sebesar 6,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 7. Output Uji F Persamaan Struktural II

| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 99.267 | 3 | 33.089 | 55.957 | .000 ^b |
| | Residual | 6.505 | 11 | .591 | | |
| | Total | 105.771 | 14 | | | |

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui nilai sig. uji F sebesar 0,000 < $\alpha = 0,05$ serta nilai $F_{hitung} 55,957 > F_{tabel} 3,59$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PMDN (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan pertumbuhan ekonomi (Z) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat pengangguran terbuka (Y).

Uji t (Parsial)

Tabel 8. Output Uji t Persamaan Struktural II

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | 58.964 | 5.468 | 10.784 | .000 |
| | PMDN (X1) | .00013 | .00006 | 2.029 | .067 |
| | PP (X2) | -5.697 | .750 | -7.599 | .000 |
| | PERT (Z) | -.016 | .147 | -.109 | .915 |

Dependent Variable: TPT (Y)

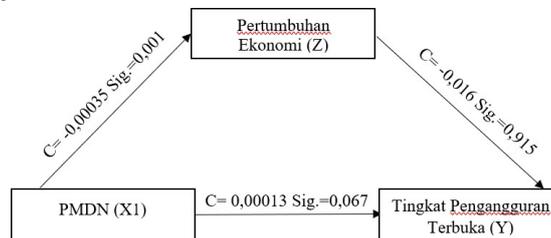
Dari tabel di atas diperoleh hasil uji t untuk persamaan struktural II sebagai berikut.

- a. Variabel PMDN (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,067 > $\alpha = 0,05$ serta nilai $t_{hitung} 2,029 < t_{tabel} 2,20099$, sehingga variabel PMDN (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y).
- b. Variabel pengeluaran pemerintah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < $\alpha = 0,05$ serta nilai $t_{hitung} -7,599 > t_{tabel} 2,20099$, sehingga variabel pengeluaran pemerintah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y).

- c. Variabel pertumbuhan ekonomi (Z) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,915 > \alpha = 0,05$ serta nilai $t_{hitung} -0,109 < t_{tabel} 2,2009$, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi (Z) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y).

Pengaruh Tidak Langsung

1. Pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi Analisis Jalur (Path Analysis)



Gambar 2. Diagram Jalur Pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh langsung X1 terhadap Y = 0,00013
 Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui Z = $0,00035 \times -0,016 = -0,0000056$
 Pengaruh total = $0,00013 + (-0,0000056) = 0,0001356$

Uji Sobel

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

$$Sab = \sqrt{(-0,016)^2 0,00007^2 + (-0,00035)^2 0,147^2 + 0,00007^2 0,147^2}$$

$$Sab = \sqrt{0,0000000459299}$$

$$Sab = 0,0002143$$

Selanjutnya, nilai t_{hitung} didapatkan melalui rumus berikut.

$$t_{hitung} = \frac{ab}{Sab}$$

$$t_{hitung} = \frac{(-0,00035)(-0,016)}{0,0002143}$$

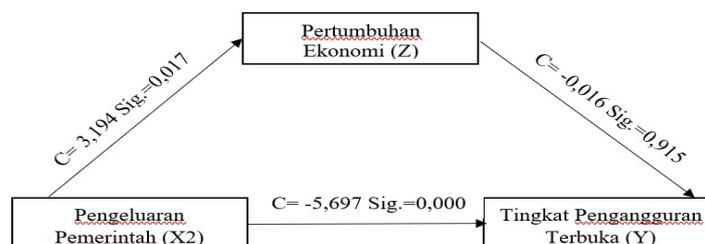
$$t_{hitung} = \frac{0,0000056}{0,0002143}$$

$$t_{hitung} = 0,0261316$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji sobel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,0261316 yang mana hasil ini lebih kecil daripada nilai t_{tabel} dengan signifikansi 5% yaitu 1,96. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa PMDN secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, serta pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi variabel intervening.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi

Analisis Jalur (Path Analysis)



Gambar 3. Diagram Jalur Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi

| | | |
|---|------------------------|-------------|
| Pengaruh langsung X2 terhadap Y | = -5,697 | |
| Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui Z | = 3,194 x (-0,016) | = -0,051104 |
| Pengaruh total | = -5,697 + (-0,051104) | = -5,748104 |

Uji Sobel

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

$$Sab = \sqrt{(-0,016)^2 1,148^2 + 3,194^2 0,147^2 + 1,148^2 0,147^2}$$

$$Sab = \sqrt{0,249263078}$$

$$Sab = 0,499262534$$

Selanjutnya, t_{hitung} didapatkan melalui rumus berikut.

$$t_{hitung} = \frac{ab}{Sab}$$

$$t_{hitung} = \frac{(3,194)(-0,016)}{0,499262534}$$

$$t_{hitung} = \frac{-0,051104}{0,499262534}$$

$$t_{hitung} = -0,102358973$$

Berdasarkan perhitungan uji sobel di atas, didapatkan t_{hitung} sebesar 0,102358973 yang mana lebih kecil daripada nilai t_{tabel} dengan signifikansi 5% yaitu 1,96. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, serta pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi variabel intervening.

Pembahasan

Pengaruh Langsung PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa PMDN secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode tahun 2007 hingga 2021. Kondisi ini tidak sesuai dengan Teori Harrod-Domar yang menjelaskan adanya pengaruh negatif dari investasi terhadap pengangguran. Kondisi ini terjadi karena investasi PMDN di Provinsi Banten cenderung bersifat padat modal (*capital intensive*). Salah satu pendorongnya ialah struktur ekonomi Provinsi Banten yang semakin bergeser ke dominasi sektor tersier, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun dan pengangguran meningkat. Terlebih lagi, sektor industri pengolahan dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Banten juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan dan sudah mulai menggunakan teknologi demi mencapai efisiensi. Selain itu, daerah tujuan PMDN pun tidak merata, melainkan hanya terfokus di daerah Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), sehingga lapangan kerja hanya terpusat di daerah tersebut dan pengangguran di daerah lain masih tetap tinggi. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian Supriawan & Arka (2019) serta Helvira & Rizki (2020).

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari hasil uji yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode tahun 2007-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan menekan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam Teori Keynes yang menyatakan bahwa tidak selalu tercipta kondisi *full employment* pada sistem perekonomian, sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah yang salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Misalnya dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan

kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, atau untuk mendanai proyek-proyek padat karya dalam upaya pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja sehingga pada akhirnya mengurangi pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jirang et al. (2018), Kaharudin et al. (2019), serta Wardhana & Kharisma (Wardhana & Kharisma, 2021) yang sama-sama menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran.

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian yang dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode tahun 2007-2021. Hasil ini tidak sesuai dengan Hukum Okun yang menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Hal ini terjadi karena masih banyak pengangguran friksional dan struktural dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah di Provinsi Banten, sementara banyak migran yang lebih unggul dan mudah memperoleh pekerjaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga mulai banyak didorong oleh pemanfaatan teknologi sehingga memungkinkan otomatisasi pekerjaan dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja sekaligus menaikkan standar keahlian yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Hal ini pada akhirnya berdampak pada masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roring et al. (2020), Purba (2020), serta Palindangan & Bakar (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Pengaruh Tidak Langsung PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil perhitungan uji sobel dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu menjadi variabel intervening, sehingga PMDN secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Salah satu penyebabnya adalah mulai bergesernya struktur perekonomian Provinsi Banten, dimana kontribusi sektor-sektor tersier dalam mendorong pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Kondisi ini juga menggeser minat investasi dari sektor sekunder menjadi sektor tersier yang cenderung bersifat padat modal (*capital intensive*) sehingga permintaan tenaga kerja menurun. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan dari penelitian Tumbel et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dari perhitungan uji sobel diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu menjadi variabel intervening, sehingga pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Kondisi ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mulai didominasi oleh sektor tersier yang cenderung didukung oleh teknologi atau permesinan sehingga menurunkan kesempatan kerja dan pada akhirnya tidak banyak berpengaruh dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah lebih memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka apabila dialokasikan untuk proyek-proyek padat karya atau untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga lebih mudah memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya tingkat pengangguran terbuka dapat dikurangi. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Tumbel et al. (2018) yang membuktikan bahwa belanja pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

5. Penutup

Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan.

1. PMDN secara langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
2. Pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
3. Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
4. PMDN secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten
5. Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Saran

1. Pemerintah daerah diharap menerapkan kebijakan yang dapat menarik minat investasi di sektor-sektor padat karya, meningkatkan pemerataan proyek PMDN di seluruh wilayah Provinsi Banten, serta mengembangkan program yang mendorong investasi di sektor-sektor informal seperti UMKM.
2. *Outsourcing* perlu dikurangi dengan ditunjang oleh program-program peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, mulai dari pengembangan pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan keterampilan melalui pelatihan kerja, sertifikasi, pelatihan wirausaha, atau pelatihan digitalisasi, sehingga penyerapan tenaga kerja asli daerah dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2015. *Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 1–20. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/315>
- Falianty, T. A. (2019). *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Fathi, K. A. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Investasi PMDN, Upah Minimum, dan Kualitas SDM Terhadap Pengangguran Terbuka Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–25.
- Garnella, R., Wahid, N. A., & Yulindawati. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 21–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i1.104>
- Hakib, A. (2019). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 56–71. <https://core.ac.uk/download/pdf/233602415.pdf>
- Hasan, I., Zunawanis, & Kurnia Zahra, R. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nagan Raya. *EKOMBIS : Jurnal Fakultas Ekonomi*, 4(2), 133–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/ekombis.v4i2.5243>

- Helvira, R., & Rizki, E. P. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, 1(1), 53–62. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb>
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya terhadap Indek Pembangunan di Indonesia. *IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22–38.
- Jirang, A., Musa, A. H., & Wijaya, A. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiem.v3i4.2318>
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & ... (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah ...* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25431>
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Mahyuddin, A. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Mutu SDM terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2019*. Universitas Hasanuddin.
- Mahzalena, Y., & Juliansyah, H. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jeru.v2i1.1742>
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (Edisi 7). Jakarta : Salemba Empat.
- Mashudi, D., Taufiq, M., & Priana, W. (2017). *Pengantar Teori Ekonomi*. Selman : Gosyen Publishing.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro* (Edisi Revisi). Bandung : PT Refika Aditama.
- Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(1), 21–31.
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 53–60. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Temuan Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal KRITIS*, 5(1), 65–80. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/149>
- Pramesti, D. A. D. G., & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal EP Unud*, 8(11), 2562–2590. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/52321/32348>
- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 194–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.997>
- Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro* (Edisi 5). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Radila, I. D., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kemiskinan terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 1054–1065. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252>
- Roring, G. D. J., Kumenaung, A. G., & Lopian, A. L. Ch. P. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Kota di Provinsi Sulawesi

- Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 70–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32806.20.4.2019> Abstrak
- Silaban, P. S. M. J., & Siagian, S. J. (2021). Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2002-2019. *Niagawan*, 10(2), 109–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/niaga.v10i2.18965>
- Supriawan, I. K. G. P., & Arka, S. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(9), 3644–3674.
- Tumbel, S. D. A., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 46–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32717.19.1.2018>
- Wardhana, A., & Kharisma, B. (2021). Determinan Tingkat Pengangguran Antar Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/70606/39469>
- World Bank. (2022). *Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate)*. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=2021&name_desc=false&start=2021&view=bar
- Yacoub, Y., & Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 132–142. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Lengkap-1.pdf#page=140>